

Asset Kalbar Tunggu Audit BPK

PONTIANAK. Gubernur Kalbar, Drs Cornelis MH mulai gerah dengan kritikan legislator DPRD Kalbar berkaitan dengan asset daerah. Cornelis mengingatkan, tidak menghubungi siapa saja yang terilit kasus hasil pemeriksaan BPK yang melibatkan anggota DPRD Kalbar.

"Kami memberikan apresiasi atas niat baik dan statement gubernur berupaya memperbaiki semua persoalan asset. Hal itu sudah sepatutnya dilakukan oleh Pemprov Kalbar. Kalau nantinya dalam memperbaiki asset ada temuan masalah hukum keterlibatan anggota DPRD Kalbar, maka segera ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundangan berlaku. Saatnya periode ini persoalan asset segera dibenahi," tegas H Retno Pramudya SH MH, Sekretaris Fraksi PPP DPRD Kalbar kepada EQuator, Selasa (2/8).

Persoalan asset di Kalbar harus

segera dituntaskan pada masa pemerintahan Cornelis. Menurut Retno, hal ini merupakan suatu prestasi yang pantas diberikan. Apresiasi ini juga harus didukung penuh para pembantu-pembantu gubernur.

"Kami fraksi PPP memberikan dukungan penuh sejak awal. Dalam pembenahan nanti ternyata ada pihak-pihak yang tersangkut masalah hukum, baik dari kalangan eksekutif maupun legislatif, tidak perlu menjadi kekhawatiran gubernur," kata Retno.

Karena, sambung politisi daerah pemilihan Sanggau-Sekadau ini, asset milik daerah itu adalah kekayaan pemerintah daerah, milik rakyat. "Mereka yang mengambil harta rakyat sudah sepatutnya harus bertanggung jawab secara hukum," tegas Retno lagi.

Gubernur Kalbar, Drs Cornelis MH pada kesempatan penyampain jawaban gubernur atas pemandan-

gan umum fraksi-fraksi terhadap APBD 2010, sepertinya sedikit gerah soal kritikan dari sejumlah fraksi di DPRD yang ditujukan kepada eksekutif.

"Masalah asset itu sudah diserahkan berkasnya kepada BPK, meski sebenarnya bukan kerjaan saya, melainkan kerjaan pemerintahan sebelumnya. Tapi kita perbaiki semuanya, kepada anggota DPRD nanti, setelah hasil ini jangan hubungi saya kalau ada anggota yang terlibat, pusing saya," tegas Cornelis saat paripurna, Senin (1/8) kemarin.

Mantan Bupati Landak ini menegaskan, permasalahan asset yang tidak terdata, bukanlah pekerjaan masa pemerintahannya saat ini. Seharusnya bertanggung jawab adalah mereka yang pernah menjabat masa pemerintahan pada kala itu, termasuk para anggota DPRD Kalbar periode lalu. Termasuk mereka yang saat ini masih

menjabat sebagai anggota DPRD Kalbar.

Meski demikian, Cornelis yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan ini tidak lepas tanggung jawab begitu saja. Dirinya juga akan menyelesaikan semerautnya asset daerah.

"Tapi tidak apa-apa, kita benahi data asset tersebut, karena saya tidak terlibat dalam hal ini. Kita tunggu hasil BPK seperti apa yang harus dibenahi. Hasil dari BPK nanti kita Pansus-kan, dan nanti kelihatan mana yang bersalah dan harus masuk penjara juga harus bertanggungjawab," ungkap Cornelis.

Cornelis mengaku sedikit terganggu atas permasalahan asset. Bukan hanya mengenai kasus tanah KONI, tapi juga beberapa rumah dinas, kendaraan dan beberapa asset lainnya, juga masih menjadi permasalahan Pemprov Kalbar. Mengingat persoalan terse-

but mengakibatkan Kalbar belum bisa mendapatkan nilai Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

"Sesuai dengan penilaian BPK belum lama ini, seharusnya Kalbar bisa mencapai hasil WTP, tapi karena asset Kalbar masih Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Bukan karena permasalahan lainnya Kalbar belum mendapatkan penilaian WTP, semua karena kasus asset kita yang tidak pernah terdata sama sekali," jelas Cornelis.

Cornelis berharap ada titik terang mengenai asset Kalbar dan penyelesaian kasus yang menurut Sekda Kalbar, M Zeet Hamdy Assovie saat ditanya gubernur saat Paripurna berlangsung, bahwa pemeriksaan berkas asset memakan waktu 30 hari. "Nah kita tunggu hasil BPK mengenai asset Kalbar, supaya tidak ada praduga apapun terhadap pemerintahan Kalbar dan tidak ada lagi rasa curiga," tegas Cornelis. (jul)